



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

[Handwritten signature]

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c) dan angka 3 dihapus 1 (satu) huruf yaitu huruf b), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kemasyarakatan;
 - b) Subbagian Pendidikan dan Pariwisata; dan
 - c) Subbagian Kesehatan dan Tenaga Kerja.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a) Subbagian Produksi;
 - b) Subbagian Sarana Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral.
 2. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) dihapus
 - c) Subbagian Keuangan.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Umum dan Rumah Tangga, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Peliputan;
 - b) Subbagian Dokumentasi; dan
 - c) Subbagian Protokol.
 3. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Subbagian Pengembangan Kinerja; dan
 - c) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik.
 - d. Staf Ahli;
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan



perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengadaan barang/jasa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 11 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang administrasi Perencanaan dan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi perencanaan dan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang administrasi perencanaan dan administrasi keuangan;
 - c. dihapus;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi perencanaan dan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

f b  A

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Mei 2019

BUPATI TABALONG, y



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 08 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 11



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI
WAKIL BUPATI

SEKRETARIAT DAERAH

STAF AHLI
BIDANG
HUKUM, POLITIK
DAN PEMERINTAHAN

STAF AHLI
BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

STAF AHLI
BIDANG
KEMASYARAKATAN
DAN SDM

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN TABALONG

ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM

JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
PEMERINTAHAN

BAGIAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

BAGIAN
HUKUM

BAGIAN
PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA
ALAM

BAGIAN
PENGADAAN
BARANG/JASA

BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

BAGIAN
UMUM DAN
RUMAH TANGGA

BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT

BAGIAN
ORGANISASI

SUBBAGIAN
PEMERINTAHAN
UMUM

SUBBAGIAN
KEMASYARAKATAN

SUBBAGIAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

SUBBAGIAN
PRODUKSI

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
PELIPIUTAN

SUBBAGIAN
KELEMBAGAAN DAN
ANALISA JABATAN

SUBBAGIAN
OTONOMI DAERAH

SUBBAGIAN
PENDIDIKAN DAN
PARIWISATA

SUBBAGIAN
BANTUAN HUKUM
DAN HAM

SUBBAGIAN
SARANA
PEREKONOMIAN

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN
DOKUMENTASI

SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN
KINERJA

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN DAN
KERJASAMA

SUBBAGIAN
KESEHATAN DAN
TENAGA KERJA

SUBBAGIAN
DOKUMENTASI
HUKUM

SUBBAGIAN
LINGKUNGAN
HIDUP, KEHUTANAN
DAN ESDM

SUBBAGIAN
PEMBINAAN DAN
ADVOKASI
PENGADAAN

SUBBAGIAN
TATA LAKSANA DAN
PELAYANAN PUBLIK

SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN
PROTOKOL

BUPATI TABALONG,
H. ANANG SYAKHFIANI